

ANALISIS KEMAJUAN INFRASTRUKTUR DAN PEMANFAATAN FASILITAS FISKAL DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) GALANG BATANG

Budhi Setyawan¹⁾; Novie Prihatiningrum²⁾

¹⁾ budhi.setyawan@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ novieprihatiningrum7@gmail.com, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bekasi

Abstract

In order to actualize the vision of National Development as stated in Law no. 17 of 2007 on the Long-Term National Development Plan of 2005-2025, one of the strategies of the Government of Indonesia is through the development of Special Economic Zones. The development of Special Economic Zones must be supported by advanced infrastructure and supporting utilities to accelerate the economy in the SEZ area. In addition, the development of SEZs also requires the provision of incentives needed to invest in SEZs. This study aims to describe the development of infrastructure, the utilization of fiscal incentives and the challenges faced in the development of the Galang Batang Special Economic Zone. This research occupies qualitative approach. The data was collected through literature review and in-depth interview. The result of research shows that infrastructure development in Galang Batang SEZ can be said to be running optimally with consistent and progressive development progress. In addition, various incentives and services provided by the government are able to attract Foreign Direct Investment which is reflected in the investment commitments that have been received by the Galang Batang SEZ. In its implementation, there are still several challenges in the development of the Galang Batang SEZ, both from internal government and external factors.

Keywords : *fiscal incentives; special economic zones; infrastructure*

Abstrak

Dalam rangka mewujudkan visi Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, salah satu strategi Pemerintah Indonesia yaitu melalui pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus harus didukung oleh infrastruktur lanjutan dan utilitas penunjang KEK untuk mempercepat roda perekonomian di wilayah KEK. Selain itu, dalam pengembangan KEK diperlukan juga pemberian insentif yang diperlukan untuk berinvestasi di KEK. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan perkembangan infrastruktur pemanfaatan insentif fiskal serta tantangan yang dihadapi dalam pengembangan KEK Galang Batang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di KEK Galang Batang dapat dikatakan berjalan optimal dengan progres pembangunan yang konsisten dan progresif. Selain itu, berbagai insentif dan layanan yang diberikan dari pemerintah mampu menarik Foreign Direct Investment yang tercermin dari komitmen investasi yang telah diterima KEK Galang Batang. Dalam pengimplementasiannya masih terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan KEK Galang Batang, baik yang berasal dari internal pemerintah maupun faktor eksternal.

Kata Kunci : insentif fiskal; kawasan ekonomi khusus; infrastruktur

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan visi percepatan dan perluasan Pembangunan ekonomi Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, salah satu strategi yang ditempuh Pemerintah Indonesia ialah pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (Maftuhah, 2017). Pembentukan KEK merupakan bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi, meningkatkan kegiatan ekspor serta penyerapan tenaga kerja yang diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional serta peningkatan nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (Rahman & Sopiana, 2019).

Hingga kini, 19 wilayah KEK telah ditetapkan dan tersebar di seluruh Indonesia. Dari 19 KEK tersebut, 11 KEK di antaranya bergerak di bidang industri, dan 8 KEK lainnya di bidang pariwisata. KEK yang bergerak di bidang industri ialah KEK Sei Mangkei, KEK Galang

Batang, KEK Kendal, KEK Arun Lhokseumawe, KEK Tanjung Api-API, KEK Palu, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), KEK Bitung, KEK Gresik, KEK Sorong dan KEK Batam Aero Technic. KEK di bidang pariwisata terdiri dari KEK Tanjung Kelayang, KEK Likupang, KEK Singhasari, KEK Tanjung Lesung, KEK Mandalika, KEK Morotai, KEK Nongsa Digital Park dan KEK Lido (Laporan Akhir Tahun Kawasan Ekonomi Khusus, 2022). KEK Tanjung Api-API kemudian dicabut izinnya oleh pemerintah pada tahun 2022 karena tidak bisa memenuhi kesanggupan beroperasi dalam waktu yang ditentukan setelah penetapan KEK tersebut.

KEK Galang Batang merupakan KEK yang diusulkan oleh badan usaha PT GBKEK Industri Park dan diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017 pada tanggal 12 Oktober 2017. KEK Galang Batang diresmikan pada tanggal 8 Desember 2018. KEK ini hanya membutuhkan waktu satu tahun lebih untuk beroperasi dan menjadi kawasan yang paling cepat beroperasi setelah ditetapkan (Dewan Nasioal KEK, 2018).

KEK Galang Batang berfokus pada kegiatan industri pengolahan mineral hasil tambang berupa bauksit beserta turunannya, serta industri logistik dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja sebanyak 23.200 orang dengan nilai investasi sebesar 36,25 triliun rupiah hingga tahun 2027. Dengan pengembangan KEK Galang Batang ini, diharapkan rantai penyelenggaraan aktivitas di KEK dapat bergerak dan menghasilkan nilai tambah dengan melibatkan masyarakat sekitar serta membangun manfaat bagi masyarakat secara optimal (Laporan Tahunan Kawasan Ekonomi Khusus, 2018). Menurut Farole, seperti dikutip dalam Putra (2022), pengembangan KEK akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dan pemerataan perekonomian di seluruh wilayah.

Pengembangan KEK harus didukung oleh infrastruktur lanjutan dan utilitas penunjang KEK untuk mempercepat roda perekonomian di wilayah KEK (Putra, 2022). Menurut Yusyhabella et al (2019) infrastruktur merupakan sektor penting dan esensial bagi perekonomian suatu negara, terutama untuk membantu kelancaran distribusi barang ekspor dan impor. Semakin baiknya kualitas infrastruktur pada suatu negara maka biaya perdagangan akan semakin kecil. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap peningkatan volume ekspor dan daya saing suatu negara di pasar internasional.

Selain itu, dalam pengembangan KEK diperlukan juga pemberian insentif yang diperlukan untuk berinvestasi di KEK. Menurut Tambunan (2021) insentif pajak akan memengaruhi ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya sehingga terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dari banyaknya investasi yang masuk. Banyak negara yang menyediakan berbagai insentif sebagai upaya efektif untuk merangsang investor agar menanamkan modalnya di KEK, tetapi beberapa negara tidak merasakan manfaat dari adanya insentif tersebut (Tarigan, 2019).

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam penyediaan infrastruktur dan insentif yang dibutuhkan para investor untuk berinvestasi di KEK (Tarigan, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, bentuk fasilitas yang terdapat di KEK, yaitu berupa fasilitas perpajakan, kepabeanan dan cukai; pajak daerah dan retribusi daerah; kemudahan lain untuk berinvestasi di KEK seperti dalam bidang pertanahan (hak atas tanah); perizinan; keimigrasian; investasi; dan dalam bidang ketenagakerjaan. Dengan adanya pemberian insentif tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing, terutama dalam menarik minat investor untuk berinvestasi di KEK.

Sesuai dengan aturan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan PP penetapan KEK, KEK mesti beroperasi dalam waktu selambat-lambatnya tiga tahun. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, izin KEK akan dicabut pemerintah. Untuk monitoring dan memastikan kegiatan kemajuan penyelenggaraan KEK, perlu diteliti apakah terdapat kemajuan dalam berbagai indikatornya. Terdapat dua hal yang

menjadi pertanyaan di penelitian ini, yaitu apakah sudah ada kemajuan dari pembangunan infrastruktur di KEK Galang Batang dan apakah sudah ada realisasi pemanfaatan insentif fiskal yang diberikan kepada KEK Galang Batang.

Kajian ini bertujuan untuk menguraikan perkembangan dan peran infrastruktur dan fasilitas fiskal terhadap pengembangan KEK Galang Batang melalui penyerapan investasi, realisasi fasilitas impor dan ekspor KEK Galang Batang, membandingkan dengan KEK di beberapa negara, dan tantangan dalam pengembangan KEK Galang Batang.

Penulisan kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua stakeholder yang terlibat dalam pembangunan KEK Galang Batang sebagai masukan, evaluasi dan informasi dalam penyelenggaraan KEK Galang Batang sehingga dapat berkembang secara efektif dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

KAJIAN LITERATUR

Kajian literatur menjelaskan Theoretical framework yang digunakan sebagai dasar mengembangkan hipotesis atau research proposition dan model penelitian. Kajian literatur dapat tersusun atas beberapa subbab/subjudul sesuai kebutuhan. Sedapat mungkin, pustaka yang diacu berasal dari sumber-sumber primer (jurnal) terbitan 5 tahun terakhir. Sumber acuan yang dicantumkan di awal kalimat ditulis menggunakan sistem Nama, (tahun), sedangkan bila dicantumkan di akhir kalimat menggunakan sistem (Nama, tahun). Pada bagian ini dapat juga ditambahkan hipotesis penelitian. Bagian pendahuluan diketik dengan Times New Roman 12 dan spasi 1.

Pada tahun 1959, model zona industri modern pertama didirikan di Shannon, Irlandia. Pembangunan zona ini terbukti mampu menghasilkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi asing. Kemudian, sejak tahun 1970-an, pembangunan zona dimulai di kawasan Asia Timur dan pada akhir 1980-an dan 1990-an di Amerika Latin dengan sebagian besar model zona berbentuk Export Processing Zones (EPZs). Dalam pelaksanaannya, Export Processing Zones (EPZs) dilakukan pengawasan melalui kontrol bea dan cukai yang ketat dan sebagian besar hasil produk (biasanya lebih dari 80%) yang diproduksi di zona tersebut harus diekspor (Zeng, 2021).

Istilah Special Economic Zones (SEZ) mencakup berbagai zona seperti Free-Trade Zones (FTZs), Enterprise Zones (EZs), Economic and Technology-Development Zones, Export-Processing Zones (EPZs), Free Zones (FZ), High-Tech Zones, dan masih banyak variasi lainnya. Terminologi yang digunakan di berbagai negara juga sangat bervariasi. Istilah yang paling umum digunakan yaitu Kawasan Bebas - Free Zones (FZ), Kawasan Ekonomi Khusus - Special Economic Zones (SEZ), Kawasan Perdagangan Bebas - Free Trade Zones (FTZ), Kawasan Perdagangan Ekspor - Export Processing Zones (EPZ), Kawasan Ekonomi Bebas - Free Economic Zones, dan Pelabuhan Bebas - Free Ports yang digunakan secara tidak konsisten (UNCTAD, 2019).

Kebijakan pembangunan SEZ bertujuan untuk menjadikan SEZ sebagai alat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kualitas infrastruktur dan insentif fiskal baik di tingkat negara bagian maupun di tingkat pusat. Jumlah Special Economic Zones (SEZ) terus mengalami peningkatan dari hari ke harinya. Dalam beberapa tahun terakhir SEZ telah mengalami perkembangan yang dengan setidaknya mencapai 5.383 SEZ yang tersebar di 147 negara. SEZ bertanggung jawab dalam meningkatkan pangsa ekspor suatu negara dan meningkatkan jumlah kesempatan kerja di seluruh dunia. Secara global, Export Promoting Zones (EPZs) merupakan instrumen yang penting untuk mempromosikan pembangunan regional, industrialisasi serta penciptaan lapangan pekerjaan (UNCTAD, 2019).

Menurut Farole (2011), Special Economic Zones secara luas dapat didefinisikan sebagai kawasan dengan batas wilayah geografis tertentu dalam batas-batas nasional suatu negara dan diterapkan aturan bisnis yang berbeda dari yang berlaku di wilayah nasional. Aturan tersebut terutama yang terkait dengan investasi, perdagangan internasional, kepabeanan dan cukai, perpajakan, dan penerapan peraturan lainnya. SEZ ini merupakan suatu zona yang diberikan lingkungan bisnis yang lebih bebas dan efektif dari perspektif kebijakan dan administratif yang diterapkan pada wilayah nasional.

Berdasarkan FIAS (2018), pada dasarnya konsep SEZ mencakup beberapa karakteristik khusus, yaitu: 1) merupakan kawasan yang dibatasi secara geografis; 2) memiliki manajemen atau administrasi individual; 3) menawarkan keuntungan bagi investor secara fisik di dalam kawasan; dan 4) memiliki kawasan pabean yang terpisah (adanya pembebasan bea) dan prosedur yang disederhanakan.

Awal mula perkembangan kawasan ekonomi di Indonesia dimulai pada tahun 1970 melalui inisiasi dari pemerintah dengan pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang memiliki istilah lain Free Trade Zones (FTZ). Kemudian Indonesia mulai merencanakan pembentukan Kawasan Berikat atau disebut juga Bonded Warehouse Zones pada tahun 1972. Selanjutnya pada tahun 1989, dilakukan pembentukan Kawasan Industri yang diikuti dengan pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) pada tahun 1996. Hingga akhirnya dibentuklah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada tahun 2009 (Suryani & Febriani, 2019).

Keberadaan KEK sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa KEK memiliki kekuatan untuk mendatangkan investasi langsung, membawa bisnis-bisnis baru ke wilayah-wilayah dan negara-negara berkembang, dan meningkatkannya ekspor. Perusahaan yang berbasis di KEK mempunyai kinerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang berbasis di luar KEK (CIIP, 2017).

Penelitian terkait kemajuan penyelenggaraan KEK Galang Batang belum banyak ditemukan. Dengan tema yang agak berbeda, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Alamsyah dan Jamaan (2023). Dalam penelitiannya disebutkan bahwa KEK Galang Batang menarik bagi investor Cina yang berkepentingan dengan sumber daya alam bauksit dan proyek hilirisasi yang dilakukan. Sementara menurut Putra (2022), pembangunan infrastruktur di KEK Galang Batang optimal dalam mendukung operasional KEK, seperti jalan kawasan, pembangkit listrik, water reservoir, dan jaringan internet. Penelitian Tambunan (2021), menyebutkan bahwa terhadap insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah bisa direspon secara berbeda oleh para pelaku ekonomi dalam pemanfaatannya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena mengkaji kemajuan infrastruktur dari awal berdirinya KEK sampai dengan tahun 2023 dan realisasi pemanfaatan insentif fiskal di KEK Galang Batang yang belum terdapat pembahasan rinci dalam penelitian-penelitian terdahulu.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Menurut Stone (1974) seperti dikutip dalam Kodoatie (2005), American Public Works Association mengartikan infrastruktur yaitu fasilitas-fasilitas fisik yang dibangun atau diperlukan oleh para agen publik untuk penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, transportasi, pembuangan limbah, tenaga listrik, dan pelayanan-pelayanan sejenis dalam rangka memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Definisi lainnya mengenai infrastruktur, menurut Grigg (1988) seperti dikutip dalam Sari & Rudiarto (2018) adalah sistem fisik yang menyediakan pengairan, drainase,

bangunan gedung, transportasi, serta fasilitas publik lainnya yang diperlukan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar manusia baik berupa kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.

Ketentuan mengenai kegiatan pembangunan dan pengoperasian KEK telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Dalam peraturan tersebut telah disebutkan bahwa penyelenggaraan KEK meliputi: lokasi, kriteria, dan kegiatan usaha; pengusulan pembentukan KEK; penetapan KEK; pembangunan dan pengoperasian KEK; kelembagaan KEK; pengelolaan KEK; dan fasilitas dan kemudahan.

Pembangunan KEK dilaksanakan paling sedikit mencakup: penetapan Badan Usaha pembangun KEK; melanjutkan penguasaan lahan dalam hal lahan yang diusulkan belum dikuasai seluruhnya; pembangunan prasarana dan sarana yang berada di dalam lokasi KEK; penyediaan sumber daya manusia untuk pengoperasian KEK; dan penyediaan prasarana dan sarana yang berada di luar lokasi KEK.

Dalam berbagai literatur, lebih banyak disebutkan insentif fiskal daripada fasilitas fiskal. Untuk menarik masuknya investasi asing, pemerintah bisa menggunakan tiga kategori utama, yaitu insentif keuangan, insentif fiskal, dan insentif lainnya, termasuk subsidi infrastruktur atau jasa, preferensi pasar dan konsesi peraturan (UNCTAD, 2004). Selanjutnya disebutkan, bahwa untuk insentif fiskal terkait perdagangan impor dan ekspor terdapat bermacam insentif yang diberikan. Untuk yang berbasis impor meliputi: pembebasan bea masuk atas barang modal, peralatan atau bahan mentah bahan, suku cadang dan barang yang berkaitan dengan proses produksi; kredit pajak untuk bea yang dibayarkan atas bahan atau perlengkapan yang diimpor. Sementara yang berbasis ekspor meliputi: pembebasan pajak ekspor; kelemahan tugas; perlakuan pajak khusus atas pendapatan dari ekspor, pengurangan pajak pendapatan untuk kegiatan khusus yang menghasilkan devisa atau untuk produksi produk ekspor; kredit pajak atas penjualan dalam negeri dengan imbalan ekspor pertunjukan; kredit pajak penghasilan atas tingkat kandungan lokal produk ekspor.

Menurut Buss (2001), dapat dilakukan kajian untuk mengukur dampak insentif pajak terhadap pertumbuhan perekonomian dan keputusan lokasi perusahaan. Penggunaan program insentif yang pajak paling umum ialah untuk melindungi negara dari kehilangan bisnis ke negara lain, melindungi bisnis dari persaingan, menyelamatkan perusahaan-perusahaan yang gagal, menarik perusahaan-perusahaan luar negeri, atau saat memulai bisnis baru. Ide di balik insentif pajak ialah bahwa insentif yang diberikan dalam kredit pajak pada akhirnya akan dilunasi secara langsung melalui pajak kepada pemerintah atau secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi, yang akan menyebabkan peningkatan pajak di masa depan.

KEK dibentuk dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan menciptakan pemerataan pembangunan antarwilayah dalam konteks kesatuan ekonomi negara. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dan dalam rangka mendorong percepatan realisasi investasi dibutuhkan ketersediaan fasilitas dan kemudahan yang ditujukan kepada para investor. Tarigan (2019) mengartikan KEK secara umum sebagai kawasan dengan batas tertentu yang menerapkan berbagai insentif dengan tujuan untuk menarik investasi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus yang mengatur terkait penyelenggaraan KEK menjelaskan bahwa KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan mendapat fasilitas tertentu. Dengan dibentuknya KEK ini diharapkan dapat memaksimalkan aktivitas industri, impor, ekspor, maupun kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai tambah serta menciptakan daya saing internasional. Di Indonesia, KEK telah mengalami perkembangan yang tersebar di berbagai daerah berdasarkan potensi demografis serta aksesibilitas masing-masing kawasan ke

pasar global. KEK terdiri dari satu atau beberapa zona yaitu pengolahan ekspor, logistik, pariwisata, pengembangan teknologi, industri, energi, dan/atau ekonomi lain (Suryani & Febriani, 2019).

Ketentuan terkait penyempurnaan fasilitas fiskal di KEK dilaksanakan dengan ditetapkannya UU Cipta Kerja yang kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Ketentuan tersebut juga mendorong lahirnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus. Ketentuan tersebut diharapkan dapat menyelaraskan ketentuan perpajakan maupun ketentuan terkait kepabeanan dan cukai serta memberikan kepastian hukum pada KEK.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, fasilitas dan kemudahan yang ditawarkan kepada badan usaha dan/atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di KEK berupa: perpajakan, kepabeanan dan cukai, lalu lintas barang, ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan dan tata ruang, perizinan berusaha, fasilitas dan kemudahan lainnya.

METODE

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memaparkan gejala, fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Arief Furchan (2005) seperti dikutip dalam Abdullah (2018), mengemukakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan dan biasanya tidak diarahkan untuk menguji hipotesis.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah perbandingan deskriptif kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, seperti dikutip dalam Rahmat (2020), salah satu model penyajian data adalah model untuk mendeskripsikan perkembangan antarwaktu. Ini sesuai dengan lingkup penelitian studi perkembangan. Menurut Abdullah (2018), studi perkembangan (development studies) adalah mengkaji perubahan (keadaan dan tahapannya), kemajuan yang dicapai oleh seseorang, suatu organisasi, lembaga, atau kelompok masyarakat tertentu.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (Library Research) dan wawancara. Menurut Nazir (2003) studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, maupun laporan-laporan yang ada kaitannya dengan masalah yang dipecahkan.

Data sekunder melalui metode ini diperoleh dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, modul, Laporan Akhir Tahun Kawasan Ekonomi Khusus dari awal pendirian tahun 2017 sampai dengan 2022, data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta sumber-sumber lain yang kredibel, yaitu data maupun informasi dalam situs resmi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (kek.go.id) dan beberapa situs lainnya yang mendukung penelitian.

Data primer diperoleh dari wawancara. Menurut Esterberg seperti dikutip dalam Sugiyono (2014), wawancara merupakan pertemuan antara dua orang yang dilakukan dengan pertukaran informasi dan ide melalui tanya jawab untuk membangun makna seputar topik tertentu. Proses wawancara ini dilakukan dengan pertimbangan pada metode Delphi. Menurut Skumolski et al (2007), metode Delphi adalah proses berulang yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyaring penilaian para ahli menggunakan serangkaian kuesioner yang diselingi dengan umpan balik. Kuesioner dirancang untuk fokus pada masalah, peluang, solusi, atau perkiraan.

Wawancara untuk memperoleh data penelitian dilakukan dengan pihak yang memiliki kewenangan terkait pengelolaan KEK, dalam hal ini pejabat pada Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketersediaan infrastruktur yang memadai sangat penting dalam pengembangan KEK. Hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah dan pengembang KEK. Pembangunan infrastruktur yang terpadu tentunya memerlukan pendelegasian dan koordinasi yang jelas antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pengembang kawasan.

Pembangunan infrastruktur merupakan suatu hal yang cukup vital dalam membantu kegiatan industri di KEK Galang Batang, khususnya dalam pengolahan bijih bauksit beserta turunannya. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diperlukan dalam rangka akses dalam perdagangan internasional dan memudahkan aktivitas ekspor dari produksi bauksit. Sebagai upaya mengoptimalkan kegiatan tersebut setidaknya diperlukan infrastruktur yang memadai berupa jalan kawasan, pelabuhan, air kebutuhan industri, tenaga listrik, jaringan telekomunikasi, dan dari segi kelembagaan diperlukan juga kantor administrator KEK Galang Batang dan gerbang kawasan.

Realisasi pembangunan infrastruktur di KEK Galang Batang dapat dikatakan cukup konsisten dan progresif setiap tahunnya. Merujuk informasi dari Laporan Akhir Tahun Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2017 sampai dengan 2022, berikut diuraikan perkembangan infrastruktur pada KEK Galang Batang, termasuk data ekspor Smelter Grade Alumina (SGA) tahun 2021 dan 2022.

Tabel 1. Realisasi Kemajuan Infrastruktur di KEK Galang Batang

Infrastruktur\ Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dermaga	440 m	984 m	984 m	984 m	984 m	984 m
Jalan Kawasan	-	2,4 km	4,82 km	3,26 km	8,08 km	8,08 km
Listrik	2 MW	2X1,3 MW	2,16 MW	2,16 MW	3X25 MW	6X25 MW
Water Storage	-	-	-	-	5 juta m ³	5 juta m ³
Coal Gas Plant	-	-	-	-	-	1,9 miliar m ³ /tahun
Dormitory pekerja kapasitas 1000 pekerja	-	-	-	-	Selesai dibangun	Aktif digunakan
Kantor Administrasi	-	Selesai dibangun	Aktif digunakan	Aktif digunakan	Aktif digunakan	Aktif digunakan
Internet	-	5 Mbps	5 Mbps	5 Mbps	1 Gbps	1 Gbps
Ekspor SGA	-	-	-	-	-	1,2 juta ton
Nilai Ekspor	-	-	-	-	2,4 triliun	Rp 7 triliun

Sumber: Laporan Perkembangan KEK (2017 – 2022) & Putra (2022)

Dari Laporan Perkembangan KEK, terdapat delapan prasarana fisik infrastruktur yang diinformasikan. Kedelapan prasarana tersebut ialah dermaga, jalan kawasan, *water storage*, *cool gas plant*, *dormitory* pekerja, kantor administrasi, dan internet. Terdapat sebagian item data yang cukup lengkap, tetapi sebagian item pada beberapa tahun tidak tersedia angkanya, baik jumlah maupun persentase kemajuan infrastruktur tersebut. Di dalam beberapa laporan hanya tertulis ‘sedang dalam pembangunan’ dan tidak ada data yang lebih terukur.

Dari data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat kemajuan pada masing-masing jenis infrastruktur yang dibangun. Dalam waktu lima tahun, prasarana fisik dan infrastruktur dukungan lainnya sudah siap dan layak untuk kegiatan operasional normal sebuah KEK. Sebagai contoh, dermaga dan jalan kawasan telah ikut aktif mendukung terlaksananya ekspor SGA tahun 2021 dan 2022. Demikian juga infrastruktur lain yang keberadaanya di KEK sangat mendorong produktivitas di KEK Galang Batang.

Progres pembangunan di KEK Galang Batang dari awal pembentukannya hingga saat ini dinilai cukup optimal. Sebagaimana juga disampaikan pihak Dewan Nasional KEK, dalam kutipan wawancara berikut.

“KEK Galang batang itu statusnya dinilai optimal pada saat pembahasan sidang dewan nasional terakhir di Januari 2023. Artinya optimal investasinya lancar meskipun targetnya juga kita perlu pertimbangkan, 36 T sekarang sampai April belum mencapai 50% dari target. Memang itu beberapa kendala masih ada gitu, termasuk sebetulnya KEK Galang Batang luasnya 2.333,6 ha, pemanfaatan lahannya sesuai catatan kami itu sekitar 56% dari total luas lahan, ini sendiri adalah catatan yang baik.” (Wawancara, 28 April 2023).

Tambahan informasi yang diberikan bahwa terkait hubungan ketersediaan infrastruktur terhadap peningkatan minat investor untuk berinvestasi di KEK seperti dalam kutipan wawancara berikut.

“Jadi bisa dilihat bahwa sebenarnya semakin baiknya infrastruktur atau semakin tingginya infrastruktur sebuah kawasan sebenarnya berpengaruh positif pada ketertarikan investor atau kenaikan dari investasi. Selain itu juga terkait di Galang Batang, infrastruktur di Galang Batang sebenarnya sudah cukup baik kalau dibandingkan dengan KEK lainnya.” (Wawancara, 28 April 2023).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa ketersediaan infrastruktur di KEK Galang Batang cukup memadai. Kemajuan pembangunan infrastruktur di KEK Galang Batang dapat dikatakan cukup progresif dan sudah cukup baik jika dibandingkan dengan KEK lainnya. Dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai tersebut dapat berpengaruh positif terhadap ketertarikan investor untuk berinvestasi di KEK Galang Batang.

Pembangunan infrastruktur di KEK Galang Batang termasuk cepat. Sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Perkembangan KEK (Denas KEK, 2021), KEK Galang Batang termasuk salah satu dari empat KEK yang berkinerja optimal. Keempat KEK tersebut ialah Galang Batang, Sei Mangkei, Kendal, dan Mandalika. Sebagai perbandingan, KEK Galang Batang yang ditetapkan tahun 2017 memiliki kinerja lebih baik daripada KEK Sei Mangkei yang ditetapkan tahun 2012. Selesaiannya proyek infrastruktur memberikan kepastian kepada investor untuk menanamkan modalnya di KEK Galang Batang. Dengan terselesaikannya proyek infrastruktur secara cepat, kegiatan pengolahan di industri di KEK terlaksana lebih cepat juga. Beroperasinya perusahaan di KEK tentu menyerap tenaga kerja, dalam hal ini pada tahun 2022 KEK Galang Batang menyerap 4.884 tenaga kerja, sementara KEK Sei Mangkei menyerap 2.213 tenaga kerja.

Fasilitas dan kemudahan yang ditawarkan di KEK merupakan faktor penting dalam menarik investor untuk berinvestasi di KEK. Dalam penyelenggaraannya, KEK Galang Batang telah memanfaatkan fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah dengan cukup baik. Data dari Dewan Nasional KEK menunjukkan bahwa dibandingkan dengan KEK lainnya, KEK Galang Batang merupakan Kawasan Ekonomi Khusus yang banyak memanfaatkan fasilitasnya. Data dari DJBC terkait pemanfaatan fasilitas fiskal baik pembebasan maupun penangguhan bea masuk dan PDRI secara rinci disajikan pada Tabel 2 dan 3.

Tabel 2. Realisasi Pemanfaatan Fasilitas Fiskal (Pembebasan) di KEK Galang Batang

Penerima Fasilitas	Tahun	Nilai Impor (USD)	Nilai Fasilitas (Rp.)		Total Pungutan
PT Bintang Alumina Indonesia	2018	1.697.877,51	BM	2.584.456.666,00	5.669.595.334,00
			PPN	2.468.110.938,00	
			PPNBM		
			PPh	617.027.730,00	
	2019	68.638.128,00	BM	100.935.980.031,06	222.184.467.817,18
			PPN	96.956.739.257,70	
			PPNBM		
			PPh	24.291.748.528,42	
	2020	255.881.777,85	BM	293.476.853.988,00	769.555.389.690,00
			PPN	373.269.878.452,00	
			PPNBM		
			PPh	102.808.657.250,00	
	2021	74.217.008,00	BM	60.776.514.985,00	195.921.154.808,00
			PPN	107.747.621.769,00	
			PPNBM		
			PPh	27.397.018.054,00	
	2022	117.152.554,00	BM	122.170.274.644,00	363.908.192.401,00
			PPN	194.089.808.376,00	
			PPNBM		
			PPh	47.648.109.381,00	
PT Solid Beton Indonesia	2019	244.097,42	BM	173.980.433,91	608.931.519,60
			PPN	347.960.869,99	
			PPNBM		
			PPh	86.990.215,70	
	2020	56.806,77	BM	39.066.016,00	136.731.056,00
			PPN	78.132.032,00	
			PPNBM		
			PPh	19.533.008,00	

Sumber: DJBC (2023)

Berdasarkan data internal Direktorat Fasilitas Kepabeanan DJBC, nilai realisasi impor dengan pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk dan Pungutan Dalam Rangka Impor (PDRI) di KEK Galang Batang sangat baik. Tabel 2, menunjukkan bahwa pemanfaatan fasilitas fiskal berupa pembebasan bea masuk dan PDRI untuk pembangunan KEK selama lima tahun terakhir (2018-2022) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 realisasi impor di KEK Galang Batang mengalami penurunan dengan nilai impor sebesar 74 juta USD. Penurunan ini sangat besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2020 sebesar 255 juta USD. Namun, pada tahun 2022 nilai impor meningkat kembali, yaitu sebesar 117 juta USD yang disebabkan adanya pemulihan kondisi perekonomian setelah sebelumnya terdampak pandemi Covid-19.

Tabel 3. Realisasi Pemanfaatan Fasilitas Fiskal (Penangguhan) di KEK Galang Batang

Penerima Fasilitas	Tahun	Nilai Impor (USD)	Nilai Fasilitas (Rp.)		Total Pungutan
PT Bintang Alumina	2021	20.027.676,00	BM	43.001.962.156,00	84.552.405.985,00

Penerima Fasilitas	Tahun	Nilai Impor (USD)	Nilai Fasilitas (Rp.)		Total Pungutan
Indonesia			PPN	33.240.355.063,00	
			PPNBM		
			PPh	8.310.088.766,00	
	2022	99.291.842,00	BM	217.692.479.175,00	444.387.589.723,00
			PPN	184.235.142.958,00	
			PPNBM		
			PPh	42.459.967.590,00	

Sumber: DJBC (2023)

Sementara untuk fasilitas berupa penangguhan bea masuk dan PDRI, berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Fasilitas Kepabeanan, sebagaimana terlihat pada Tabel 3, realisasi impor dengan pemanfaatan fasilitas fiskal berupa penangguhan bea masuk dan PDRI untuk pembangunan KEK mengalami peningkatan yang signifikan dengan nilai impor pada tahun 2022 sebesar 99 juta USD dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 20 juta USD.

Dari Tabel 2 dan Tabel 3 di atas, dapat kita simpulkan bahwa pemanfaatan fasilitas fiskal, baik berupa pembebasan maupun penangguhan bea masuk dan PDRI di KEK Galang Batang telah dilaksanakan dengan cukup optimal. Akan tetapi, terjadi penurunan nilai impor yang cukup signifikan pada tahun 2021 yang berakibat pula terhadap pemanfaatan fasilitas fiskal pada KEK Galang Batang. Berdasarkan Laporan Akhir Tahun Kawasan Ekonomi Khusus (2021), penurunan nilai impor tersebut dikarenakan adanya perlambatan ekonomi akibat pandemi global Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya kegiatan di dalam negeri.

Tabel 4. Realisasi Ekspor KEK Galang Batang

<i>Perusahaan</i>	<i>Tahun</i>	<i>Nilai Devisa Ekspor</i>
<i>PT Bintang Alumina Indonesia</i>	<i>2021</i>	<i>Rp2.462.084.418.829</i>
	<i>2022</i>	<i>Rp7.002.048.772.141</i>

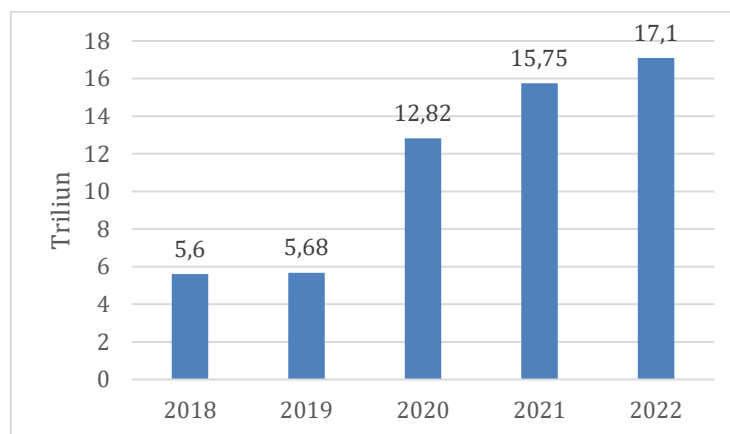
Sumber: DJBC (2023)

Berdasarkan Laporan Akhir Tahun Kawasan Ekonomi Khusus (2022), hingga bulan Desember 2022, total produksi SGA PT Bintang Alumina Indonesia (BAI) telah mencapai 1,2 juta ton dengan nilai ekspor Rp7 triliun. Negara yang menjadi tujuan ekspor produk ini ialah Malaysia dan Tiongkok. Kegiatan ekspor ini dapat memperbaiki neraca perdagangan dan berkontribusi positif kepada perekonomian nasional. Berdasarkan data internal Direktorat Fasilitas Kepabeanan DJBC yang tercermin dalam Tabel 4, nilai ekspor KEK Galang Batang oleh PT BAI meningkat secara signifikan, yaitu sebesar Rp7 triliun. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2,4 triliun.

Berbagai insentif dan layanan yang diberikan dari pemerintah secara nyata menarik bagi investor. Hal ini tercermin dari komitmen investasi yang telah diterima KEK Galang Batang. Berdasarkan Laporan Akhir Tahun Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2022, nilai realisasi investasi pembangunan pada KEK Galang Batang sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp17,10 triliun.

Berdasarkan data dari Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dalam Gambar 1, sepanjang tahun 2018-2022 realisasi investasi pada KEK Galang Batang terus menerus mengalami peningkatan. Namun, hingga tahun 2022, realisasi investasi di KEK Galang Batang belum mencapai 50% dari target investasi sebesar 36,25 Triliun. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pandemi global Covid-19 yang memengaruhi mobilitas investasi pada KEK Galang Batang yang seharusnya bisa diraih dalam kondisi normal.

Gambar 1. Realisasi Investasi pada KEK Galang Batang Tahun 2018-2022



Sumber: Laporan Perkembangan KEK (2018 - 2022)

Best Practice KEK di Dunia

Merujuk dari beberapa keberhasilan penerapan SEZ di beberapa negara, berikut adalah *best practices* penerapan SEZ yang dapat dijadikan pembelajaran dalam pengembangan KEK di Indonesia, khususnya KEK Galang Batang.

a. Tiongkok

Di Tiongkok, pembangunan *Special Economic Zones* (SEZ) menjadi bagian penting ketika pemerintahan Tiongkok memulai reformasi dan kebijakan “*Open Door*” atau reformasi ekonomi pintu terbuka pada tahun 1978 sebagai upaya untuk mengubah keadaan dan mengejar perkembangan dunia. Pada Agustus 1980, Shenzhen, Zhuhai, dan Shantou di Provinsi Guangdong ditetapkan sebagai *Special Economic Zones* yang kemudian diikuti oleh Xiamen di Provinsi Fujian pada Oktober 1980. Hal tersebut dilakukan dalam rangka penerapan suatu kebijakan ekonomi pragmatis dan terbuka yang diterapkan sebagai eksperimen atas kebijakan tersebut yang apabila terbukti keberhasilannya maka akan diterapkan secara lebih luas di seluruh negeri (Zeng, 2015).

Shenzhen *Special Economic Zone* (SEZ) adalah kawasan pertama yang dibuat selama periode awal reformasi ekonomi pintu terbuka Tiongkok. Terletak di kota pesisir yang berbatasan dengan negara bagian menjadi keuntungan sendiri bagi Shenzhen sebagai penghubung dan jembatan antara Hong Kong, Tiongkok, dan Tiongkok daratan serta menjadi pusat pelayaran, pusat perdagangan dalam lingkup regional, pusat perekonomian dalam skala

internasional serta pasar bebas dunia. Pada tanggal 6 Agustus 1980, Komite dari Kongres Rakyat Nasional atau yang disebut *Standing Committee of the National People's Congress* mengesahkan area seluas 327,5 km² tersebut untuk ditetapkan sebagai zona ekonomi eksperimental (Zeng, 2010).

Setelah penetapannya sebagai SEZ, Shenzhen mulai memperluas kegiatannya, terutama melalui kegiatan pengolahan, perdagangan, dan perakitan. Setelah 15 tahun, industri berteknologi tinggi di Shenzhen telah berkembang cukup pesat dan kota tersebut menjadi salah satu basis dalam pengembangan industri berteknologi tinggi di Tiongkok. Dalam 20 tahun sejak pendiriannya sebagai SEZ, Shenzhen telah berkembang menjadi pusat ekonomi utama di wilayah pesisir selatan dan telah berubah menjadi kota modern. Pada saat yang sama, Shenzhen menjadi salah satu lokasi utama untuk investasi asing di Tiongkok. Jadi, dapat dikatakan bahwa Shenzhen merupakan SEZ paling maju dan paling sukses di Tiongkok (Zeng, 2010).

Sebagai langkah terobosan awal, pada pembangunan Shenzhen SEZ, pemerintah menitikberatkan pada manajemen pembangunan infrastruktur dan menerapkan serangkaian kebijakan khusus dalam rangka menyerap investasi asing maupun domestik. Shenzhen SEZ telah menyediakan infrastruktur dasar yang sangat memadai serta pelayanan publik yang efisien dan efektif. Salah satu fitur yang bernilai tambah dari SEZ tersebut yaitu adanya layanan satu pintu atau *one-stop-shop* (OSS) service (Zeng, 2021).

Pengembangan SEZ melibatkan banyak pemangku kepentingan yang bertanggung jawab perihal tanah, transportasi, utilitas, kepabeanan dan cukai, perpajakan, keuangan, imigrasi, dan keterampilan. Dengan adanya OSS yang efektif dapat membuat layanan publik, seperti pendaftaran, lisensi, perizinan, kepabeanan dan cukai maupun perpajakan menjadi jauh lebih sederhana dan efisien. Dalam menjaga agar sistem OSS dapat berjalan dengan efektif, dibangunlah koordinasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah serta lintas sektor pemerintahan yang berbeda (Zeng, 2021).

Aspek penting lainnya yaitu adanya kebebasan atau otonomi yang lebih besar dalam bidang politik dan ekonomi. SEZ memiliki kewenangan legislatif untuk mengembangkan undang-undang dan peraturan daerah, termasuk peraturan terkait tarif dan struktur pajak daerah sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan nasional dalam rangka mengelola kawasan tersebut. Kebijakan tersebut tentunya memberikan mereka lebih banyak kebebasan dalam menciptakan kebijakan baru dan langkah-langkah pembangunan yang dianggap penting untuk membangkitkan perekonomian dan dapat berperan penting dalam keberhasilan SEZ (Zeng, 2010).

Hal yang tak kalah penting yaitu komitmen dari pemerintah dalam membangun lingkungan bernuansa bisnis. Bentuk konkrit komitmen dari pemerintah yaitu pemerintah pusat telah mencoba mendesentralisasikan kewenangannya dan membantu menciptakan lingkungan hukum dan kebijakan yang terbuka dan kondusif untuk pengembangan SEZ. Mereka tidak hanya menerapkan kebijakan dan sistem administrasi yang efisien tetapi juga dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, listrik, air, gas, telekomunikasi, saluran pembuangan, dan pelabuhan, yang dalam banyak kasusnya melibatkan investasi langsung dari pemerintah yang cukup besar. Selain itu, pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan peraturan dalam penyelenggaraan SEZ berdasarkan kebutuhan bisnis dan kondisi pasar (Zeng, 2010).

b. Thailand

Berdasarkan informasi yang dilansir dari situs *Open Development Thailand*, *Special Economic Zones* di Thailand merupakan kawasan khusus yang baru-baru ini ditetapkan oleh *Special Economic Zone Development Board of the Thai Government* atau Dewan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pemerintah Thailand. Merujuk pada informasi dari

situs *ASEAN Briefing*, Thailand memperkenalkan kebijakan pengembangan *Special Economic Zones* pada tahun 2015 sebagai bagian integral dari kebijakan ekonomi ekspansif dalam rangka memperluas peluang investasi dan perdagangan di daerah. Masing-masing SEZ memiliki target industri yang ditentukan dan dikategorikan berdasarkan wilayah tempat SEZ tersebut berada. Industri tersebut meliputi: pertanian, perikanan dan usaha terkait; keramik; garmen, tekstil, dan kulit; perabot rumah tangga; aksesoris perhiasan dan fashion; peralatan medis; mobil, mesin, dan suku cadang; peralatan listrik dan elektronik; plastik; produk medis; logistik; kawasan industri; dan kegiatan yang mendukung pariwisata. Pengembangan SEZ dibagi menjadi dua fase, dengan fase pertama meliputi Provinsi Tak, Sa Kaeo, Trat, Mukdahan, dan Songkhla. Provinsi lainnya ialah Chiang Rai, Nong Khai, Nakhon Phanom, Kanchanaburi, dan Narathiwat.

Di Thailand, penanganan pada bidang investasi sebagian besar dikendalikan oleh BOI (*Board of Investors*) yang berperan dalam mempromosikan investasi asing di Thailand, memberikan informasi, layanan, maupun insentif kepada para investor serta menyusun kebijakan terkait investasi. Namun, pemerintah pusat juga memiliki peran yang cukup besar dalam mengatur investasi, sedangkan pemerintah provinsi tidak memiliki peran sama sekali. Dampak dari pelaksanaan sentralisasi di Thailand ialah tidak adanya peraturan yang bias maupun tumpang tindih antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah Thailand melalui BOI memberikan dukungan penuh kepada para investor dan mereka dinilai bebas dari korupsi, kooperatif, dan transparan (Wahyuni, 2013).

Dalam penyelenggaraan SEZ, pemerintah Thailand telah merencanakan pembangunan infrastruktur, pemberian insentif untuk berinvestasi dan pengembangan dalam layanan administrasi untuk memudahkan akses bagi tenaga kerja asing dalam rangka merangsang pembangunan ekonomi dengan menarik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) baru. Selain itu, di SEZ juga telah tersedia beberapa keistimewaan dibandingkan wilayah lain, seperti penyediaan *One Stop Service Center* (OSS), adanya pengurangan pajak dan prioritas akses pada tenaga kerja asing kepada para investor yang berinvestasi di kawasan tersebut. Pemerintah juga gencar dalam melakukan promosi untuk menarik investasi dan memberikan berbagai dukungan dalam pembangunan SEZ (Wahyuni, 2013).

c. Vietnam

Pengembangan *Special Economic Zones* di Vietnam merupakan konsekuensi dari adanya reformasi ekonomi pada tahun 1986 yang pembangunannya dilakukan secara bertahap dengan melewati berbagai tantangan. Awalnya pemerintah berfokus kepada kebijakan terkait *Foreign Direct Investment* (FDI). Kemudian pada tahun 1991, pemerintah mengadopsi model *Export Processing Zone* (EPZ) yang mengalami beberapa perubahan model kawasan seperti *Industrial Zones* (IZ) dan *High-Tech Industrial Zones* (HTIZ). Pada akhirnya pemerintah Vietnam memberikan gagasan pengembangan kawasan dengan beberapa keistimewaan, yaitu *Special Economic Zones* (SEZ) atau *Specially Administered Economic Zone* (SAEZ) yang disetujui oleh dewan nasional pada tahun 2018 dengan dua jenis SEZ utama, yaitu *Border Gate Economic Zones* (BGEZ) dan *Coastal EZ* (Aijaz et al, 2022).

Pada tahun 2018, pemerintah menginisiasi pembentukan undang-undang terkait penyelenggaraan EZ disertai detail pengembangannya dengan pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan urusan lain dikembangkan dengan metode *Build, Operate and Transfer* (BOT), *Build and Transfer* (BT) dan *Public-Private Partnerships* (PPP). Tujuan utama pembentukan kawasan ini yakni untuk mempromosikan perdagangan melalui perbatasan dengan menghubungkan daerah perbatasan melalui infrastruktur. Selain itu pembentukan kawasan ini dilakukan sebagai upaya dalam memfasilitasi perdagangan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat pada kedua sisi perbatasan (Aijaz et al, 2022).

Pembangunan SEZ di Vietnam cukup memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Salah satu hal yang dapat dijadikan pelajaran dalam pengembangan SEZ di Vietnam, yaitu penyederhanaan prosedur perizinan melalui sistem OSS yang dianggap sangat efisien dalam membantu pelaku usaha memperoleh perizinan dengan waktu yang singkat. Sejak awal pengembangan SEZ, pemerintah telah memutuskan penggunaan OSS di setiap kawasan. OSS ini dianggap sebagai layanan mendasar dalam rangka menyediakan lingkungan yang kompetitif bagi para investor. Perusahaan di kawasan tersebut melaporkan bahwa dalam mendapatkan persetujuan aplikasi, perizinan usaha, izin konstruksi, jaringan utilitas, maupun layanan kepabeanan dan cukai di Vietnam memiliki waktu tunggu tersingkat dari hampir semua negara dalam survei (Farole, 2011).

Tantangan dalam Pengembangan KEK Galang Batang

Kecepatan *progress* pembangunan di KEK Galang Batang sangat konsisten dan progresif sehingga patut untuk diapresiasi. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya pemanfaatan fasilitas dan kemudahan yang tersedia di KEK Galang Batang oleh para pelaku usaha dengan cukup baik. Namun, dalam perkembangannya terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan dan permasalahan yang masih harus dipecahkan. Beberapa kendala dan permasalahan yang perlu menjadi atensi dalam pengembangan KEK Galang Batang diuraikan sebagai berikut.

a. Prosedur dan Sistem Perizinan yang Rumit dan Memerlukan Waktu Lama

Sistem perizinan usaha yang rumit menjadi salah satu kendala dalam pengembangan infrastruktur di KEK Galang Batang, baik perizinan dari pemerintah pusat, perizinan dari pemerintah daerah maupun perizinan dari sektor tertentu. Dalam pengimplementasiannya masih sering terjadi ketidakkonsistenan atau misinterpretasi. Sistem perizinan dinilai masih kompleks dan berbelit, serta proses perizinan yang harus dilewati oleh para investor sebelum melakukan usaha dirasa cukup panjang. Selain itu, prosesnya memerlukan waktu yang lama serta melibatkan banyak instansi dalam pengurusannya.

Pemerintah telah menerapkan reformasi yang dikemas dalam bentuk omnibus law untuk dapat menyelesaikan seluruh keruwetan prosedur perizinan dalam waktu singkat yang dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dari pembahasan tersebut menghasilkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) untuk menyelesaikan beberapa hambatan dalam penyelenggaraan KEK di Indonesia. Salah satu perubahan yang diakibatkan oleh UU Cipta Kerja tersebut ialah adanya perizinan usaha yang berbasis risiko yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengedepankan perubahan prosedur permohonan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

Dengan adanya perbaikan kualitas pelayanan dalam perizinan usaha melalui sistem OSS ini diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang memuaskan dengan setidaknya pelayanan lebih mudah dan tidak berbelit-belit. Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penerapan sistem OSS ini masih ditemui cukup banyak kendala.

b. Kendala Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah

Hal lain yang menjadi kendala dalam pengembangan KEK Galang Batang yaitu adanya kendala regulasi yang berlaku di KEK. Dalam melakukan usaha pasti dihadapkan dengan berbagai regulasi yang mungkin penanganannya dilakukan oleh instansi yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat mengarah kepada terjadinya tumpang tindih antarregulasi yang akan berpengaruh terhadap aktivitas para pelaku usaha. Adanya ketidaksinkronan antara peraturan satu dengan peraturan lain memungkinkan terjadinya penurunan daya tarik investasi.

Kebijakan pemerintah pusat yang terkadang tidak selaras dengan kebijakan pemerintah daerah juga perlu menjadi perhatian untuk dilakukan perbaikan. Hal tersebut tentunya dapat berpengaruh terhadap penyelenggaraan KEK Galang Batang. Pemerintah perlu melakukan koordinasi dan perlu mengintegrasikan kelembagaan pembentuk regulasi yang ada selama ini sehingga terdapat sinergi dalam pembentukan peraturan untuk mengintensifkan tata kelola dan koordinasi dalam pengembangan KEK. Dengan demikian, penyelenggaraan KEK dapat lebih maksimal dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia.

Zeng (2021) menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan SEZ, kebijakan dan peraturan yang jelas, transparan dan sederhana yang tidak saling tumpang tindih ataupun bertentangan antara peraturan satu dengan yang lain merupakan faktor yang sangat penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para investor. Hal tersebut juga sangat penting untuk memberikan kejelasan peran dan tanggung jawab bagi semua pihak yang terlibat. Di Tiongkok, Malaysia, Korea, Singapura, dan beberapa negara lainnya yang berhasil dalam penyelenggaraan SEZ sudah terdapat undang-undang dan peraturan yang relevan dengan penyelenggaraan SEZ atau diberlakukan saat SEZ tersebut ditetapkan.

c. Kurangnya Komitmen dalam Pengembangan KEK Galang Batang

Dari hasil wawancara dengan pihak Dewan Nasional KEK, permasalahan berikutnya yang perlu menjadi catatan yaitu terkait komitmen semua elemen baik dari pemerintah, pengelola KEK maupun pelaku usaha di KEK Galang Batang. Pengelola KEK dalam manajemen dan pelayanannya diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang lebih profesional. Selain itu, ketika terjadi transisi pemerintahan perlu dilakukan koordinasi untuk menjaga kesinambungan pengembangan KEK Galang Batang.

Menurut Zeng (2011), salah satu faktor penentu keberhasilan SEZ lainnya yaitu adanya peran pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dalam pengembangan SEZ. Pemerintah dan pihak swasta yang memiliki komitmen dan keahlian dalam melakukan perencanaan, perancangan, dan pengembangan SEZ ataupun pembangunan infrastruktur dan masyarakat yang kooperatif cenderung memberikan hasil yang lebih baik bagi pengembangan SEZ. Selain itu, koordinasi dan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah serta kejelasan peran mereka sangat penting untuk kelancaran penyelenggaraan SEZ (Zeng, 2021).

PENUTUP

Simpulan

Dari pembahasan atas infrastruktur dan fasilitas fiskal dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang serta tantangan dalam pengembangan KEK Galang Batang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Pembangunan Infrastruktur di KEK Galang Batang dapat dikatakan berjalan optimal dengan progres pembangunan yang konsisten dan progresif. Beberapa target pembangunan telah terpenuhi dan beberapa lainnya sedang dalam tahap pembangunan.
- 2) Ketersediaan infrastruktur pada KEK Galang Batang yang memadai berpengaruh positif terhadap ketertarikan investor untuk berinvestasi di KEK Galang Batang. Selain itu berbagai insentif dan layanan yang diberikan dari pemerintah mampu menarik Foreign Direct Investment yang tercermin dari komitmen investasi yang telah diterima KEK Galang Batang.
- 3) Komitmen pemerintah sebagai upaya meningkatkan efektivitas KEK diwujudkan melalui adanya berbagai fasilitas dan kemudahan yang diberikan dalam memfasilitasi pengembangan KEK. Dalam penyelenggaraannya, KEK Galang Batang telah memanfaatkan fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah dengan cukup optimal. KEK Galang Batang

melakukan ekspor perdannya pada tahun 2021 dan di tahun 2022 kegiatan ekspor mengalami peningkatan yang signifikan.

- 4) Faktor kunci keberhasilan beberapa negara dalam implementasi SEZ seperti China maupun Thailand bergantung pada visi jangka panjang, kebijakan pemerintah, dukungan investasi, tingkat keterampilan dan ketersediaan sumber daya manusia, manajemen dan layanan serta komitmen para pemangku kepentingan.
- 5) Berdasarkan hasil identifikasi, beberapa tantangan dalam pengembangan KEK Galang Batang yaitu prosedur dan sistem perizinan masih rumit dan dalam pengurusannya melibatkan banyak instansi sehingga memakan waktu cukup lama, serta regulasi yang tidak relevan dengan kondisi yang ada di lapangan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal objek penelitian, yaitu pada infrastruktur dan fasilitas fiskal saja, serta cakupan data yang hanya enam tahun. Data yang diperoleh tidak lengkap untuk rincian dalam masing-masing tahun, terutama data dari Sekretariat Dewan Nasional KEK. Selain itu, karena keterbatasan waktu, penelitian ini berupa penelitian deskriptif dan tidak dilakukan melalui penelitian kualitatif yang lebih komprehensif.

Saran

Agar pengembangan KEK Galang Batang dapat lebih optimal, penulis memberikan saran atas masalah yang terjadi, yaitu:

- 1) Untuk memaksimalkan pemanfaatan fasilitas serta meningkatkan penyerapan investasi di KEK Galang Batang melalui efisiensi prosedur perizinan, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam perizinan usaha melalui penyempurnaan sistem Online Single Submission (OSS) dan dilakukan pengintegrasian sistem yang cakupannya lebih luas antar instansi atau lembaga.
- 2) Dalam rangka mengatasi misinterpretasi dalam ketentuan perizinan, pemerintah atau pihak pengelola diharapkan dapat melakukan sosialisasi secara terus-menerus dan berkesinambungan kepada pihak yang berkepentingan.
- 3) Pemerintah perlu melakukan upaya khusus melalui serangkaian reformasi kebijakan dan regulasi sehingga ketentuan-ketentuan terkait penyelenggaraan KEK relevan dengan kondisi KEK di lapangan, terintegrasi serta berdampak jangka panjang.

Saran untuk penelitian selanjutnya ialah dilakukannya analisis yang lebih komprehensif atas kemajuan KEK Galang Batang dalam banyak objek, tidak terbatas pada infrastruktur dan fasilitas fiskal saja. Penelitian baik kuantitatif atau kualitatif yang lebih komprehensif akan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan rinci mengenai perkembangan KEK Galang Batang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah K. 2018. Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen. Gowa: Gunadarma Ilmu.
- Adam, L. (2019). Promoting the Indonesian special economic zones for tourism: lessons from Mandalika and Tanjung Kelayang. *Economics and Finance in Indonesia*, 65(1), 3.
- Aijaz, U., Hassan Daud Butt, D., Bano, S., Hayat, A., Raees, M. B., & Mazhar, M. (2022). Dynamics Of Sezs A Comparative Analysis Of Incentive Packages For Special Economic Zones Of Pakistan, Bangladesh & Vietnam. *Journal of Positive School Psychology*, 6(11), 1247-1269.
- Alamsyah, M.R. & Jamaan, Ahmad. (2023). Pola Investasi Cina Melalui Belt and Road Initiative di Indonesia (studi Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang

- Batang). *Jurnal Politik Antarbangsa Globalisme dan Intermestik*, Vol. 01. No. 01, 15-33.
- Buss, Terry. (2001). The Effect of State Tax Incentives on Economic Growth and Firm Location Decisions: An Overview of the Literature. *Economic Development Quarterly* 15 (1): 90–105.
- Competitive Industries and Innovation Program (CIIP). (2017). Special Economic Zones An Operational Review of Their Impacts. The World Bank Group, Washington DC, 115.
- Destaningtyas, Valenshia. (2010). Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia Sebagai Upaya Peningkatan Penanaman Modal dan Daya Saing Internasional. Depok: Universitas Indonesia.
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia. (2017). *Laporan Tahunan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2017*. Jakarta Pusat.
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia. (2018). *Laporan Tahunan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2018*. Jakarta Pusat.
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia. (2019). *Laporan Tahunan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2019*. Jakarta Pusat.
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia. (2020). *Laporan Tahunan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2020*. Jakarta Pusat.
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2021*. Jakarta Pusat.
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2022*. Jakarta Pusat.
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. *Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang*. <https://kek.go.id/kawasan/KEK-Galang-Batang> (diakses pada 25 April 2023).
- DJBC. (2023). Laporan Realisasi Ekspor dan Pemanfaatan Fasilitas Fiskal KEK Galang Batang. Direktorat Fasilitas Kepabeanan.
- Farole, T. (2011). Special economic zones in Africa: comparing performance and learning from global experiences. World Bank Publications.
- FIAS. (2008). Special Economic Zones Performance, Lessons, Learned, and Implications for Zone Development. Washington DC: The World Bank Group.
- Kodoatie, R.J., (2005). Pengantar Manajemen Infrastruktur. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Komala, I. D. A., Waseh, H., & Rahmawati, R. (2015). Implementasi Kebijakan Dan Kendala Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Maftuhah, T., Waseh, H., & Maisaroh, I. (2017). Dampak Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten (Studi pada Pertumbuhan UMKM di Daerah Penyangga KEK). Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Maqin, A. (2014). Pengaruh Kondisi Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Barat. *Trikonomika Journal*, 10(1), 10-18.
- Mestika, Zed. 2003. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Nazir, Moh. 2003. Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Open Development Thailand. (2018). Special Economic Zones. <https://thailand.opendevloppmentmekong.net/topics/special-economic-zones/> (diakses pada 07 Mei 2023)
- Pakdeenurit, P., Suthikarnnarunai, N., & Rattanawong, W. (2014). Special Economic Zone: Facts, roles, and opportunities of investment. *In Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists (Vol. 2, January, pp. 1-5)*.

- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
- Putra, F. A. (2022). Analisis Implementasi Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang Di Kabupaten Bintan. Universitas Islam Riau.
- Rahman, M. T., & Sopiana, Y. (2019). Analisis Pengaruh Investasi, Ekspor dan Tenaga Kerja terhadap PDRB dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Kotabaru. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 2(4), 829-841.
- Rahmat, Abdul. (2020). Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner. Ideas Publishing, Gorontalo.
- Republik Indonesia. (2009). Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066. Sekretariat Negara. Jakarta
- Sari, Kumala P. S., & Rudiarto, I. (2018). Kajian Pelaksanaan Penyediaan Utilitas Umum Perkotaan Terpadu Kabupaten Temanggung. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Vol 14, No 2, 123-130.
- Skumolski, Gregory J, Hartman, Francis T, & Krahn, Jennifer. (2007). The Delphi Method for Graduate Research. *Journal of Information Technology Education*, Volume 6, 2.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kombinasi Mix Methods. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, N. I., & Febriani, R. E. (2019). Kawasan Ekonomi Khusus Dan Pembangunan Ekonomi Regional: Sebuah Studi Literatur. *Convergence: The Journal of Economic Development*, 1(2), 40-54.
- Tambunan, M. R. (2021). Suatu catatan atas tantangan implementasi insentif fiskal di kawasan ekonomi di indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis INOVASI*, 17(3), 578-592.
- Tarigan, R. M. (2019). The Role of Incentives in Indonesia Special Economic Zone (Case in Sei Mangkei, North Sumatera Province). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(3), 411-419.
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2004). Incentives. UNCTAD Serie on Issues in International Investment Agreements, New York & Geneva, 5-6.
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2019). World investment report 2019: Special economic zones. New York: United Nations Publications
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2020). World Investment Report 2020: International production beyond the pandemic. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.
- Vasundhara Rastogi. (2018). Thailand's Special Economic Zones – Opportunities for Investment. <https://www.aseanbriefing.com/news/thailands-special-economic-zones-opportunities-investment/> diakses pada 16 Maret 2023.
- Wahyuni, S., Astuti, E. S., & Utari, K. M. (2013). Critical outlook at special economic zone in Asia: a comparison between Indonesia, Malaysia, Thailand and Tiongkok. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 28(3), 336-346.
- Yusyhabella, P., Daryanto, A., & Novianti, T., (2019). Analisis Pengaruh Infrastruktur terhadap Perdagangan dan Keberhasilan Integrasi Ekonomi Indonesia ke ASEAN+3. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pemabngunan*, Desember, 8(2), 145-162.
- Wahyuni, S., dan Wahyuningsih. (2016). Panduan Praktis Strategi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

- Zeng, D. Z. (2015). Global experiences with special economic zones: Focus on Tiongkok and Africa. *World Bank Policy Research Working Paper*, (7240).
- Zeng, D. Z. (2016). Special economic zones: Lessons from the global experience. *PEDL synthesis paper series*, 1(1), 1-9.
- Zeng, D. Z. (2021). The Dos and Don'ts of Special Economic Zones. *Available at SSRN* 4007621.
- Zeng, D. Z. (2021). The Past, Present, and Future of Special Economic Zones and Their Impact. *Journal of International Economic Law*, 00, 1-17.
- Zeng, D. Z. (Ed.). (2010). Building engines for growth and competitiveness in Tiongkok: Experience with special economic zones and industrial clusters. World Bank Publications.